



RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal ini tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai Perangkat Daerah, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang menyusun Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang Tahun 2022 yang mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- a. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelumnya dalam Renstra Perangkat Daerah;
- b. Renja Perangkat Daerah disusun sebagai dokumen penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berkenaan;
- c. Renja merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan;
- d. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah sendiri terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu :

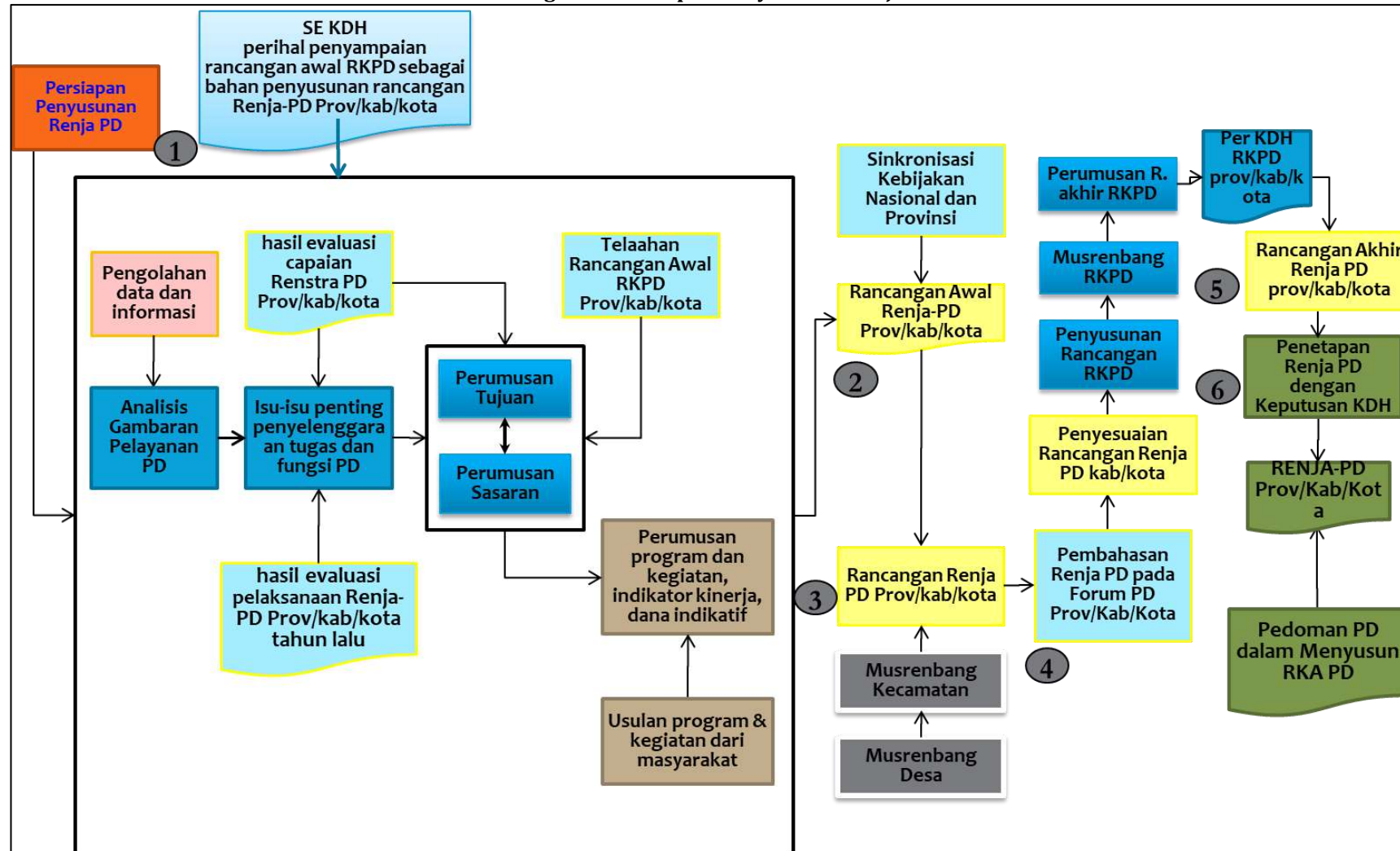
- a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang difasilitasi oleh Bappelitbangda
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
- f. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Setelah melalui beberapa tahapan dalam penyusunannya, Rancangan Renja perangkat daerah disempurnakan dan menjadi Renja Perangkat Daerah yang definitif dengan kriteria sebagai berikut :

1. Merupakan dokumen penjabaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022;
2. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022;
3. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022;
4. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
5. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju Tahun 2022.

Adapun bagan alir tahapan penyusunan dan kedudukan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang disusun Sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022 yaitu **“Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dalam mendukung Pemanjangan Pemulihan Ekonomi Menuju Sampang Hebat Bermartabat”**, dan penjabaran dari tujuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu **“Menurunnya Jumlah PMKS dan Meningkatnya kesetaraan gender dan Perlindungan Anak”**.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421)
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2015-2019;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
24. Peraturan Bupati Sampang Nomor 46 Tahun 2020 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Sampang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang Tahun 2022 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang Tahun 2022.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang Tahun 2022 secara umum adalah :

1. Tersedianya dokumen penjabaran Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022;

2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2022, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1).

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang meliputi Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung beserta Program dan Kegiatannya.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021 dimaksudkan untuk menilai sekaligus menganalisa pelaksanaan program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang. Evaluasi ini meliputi evaluasi kinerja Renja Tahun 2021 dan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Dari evaluasi ini dapat diketahui secara langsung capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan tahun ke-lima pelaksanaan Renstra 2019-2024.

Dengan demikian, dapat dilihat faktor-faktor pendorong keberhasilan dan faktor kendala yang terjadi selama melaksanakan program dan kegiatan yang telah tersusun dalam Renstra Dinas Sosial.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan dan Pencapaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

Pada tahun anggaran 2021 Anggaran Urusan Wajib Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial sebesar Rp. 12.075.325.019,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.480.904.698,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 7.594.420.321,00. Dengan total realisasi sebesar Rp. 10.465.092.848,00 (86,67%) terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.225.876.755,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 6.239.216.093,00 sedangkan untuk Anggaran urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp. 749.205.165,00 dengan Realisasi Sebesar Rp. 720.757.871,00 (96,20) Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 12 program dan 24 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2021 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Biaya			Indikator			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Menurunnya Jumlah PMKS				Persentase PMKS	8,87	8,71	98,20
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	5,224,084,902	4,763,933,775	91,92	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi Dukungan	100	92	92

					pembaca layar diaktifkan.			
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	18,531,748	16,132,500	87,05	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	100	87	87
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,607,896	3,505,000	97,15	Jumlah dokumen renstra/Renja yang disusun	2 dok	2 dok	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,827,735	2,527,000	89,37	Jumlah dokumen RKA yang disusun	1 dok	1 dok	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,301,485	1,276,500	98,08	Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun	1 dok	1 dok	100
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,678,985	2,675,000	99,85	Jumlah dokumen DPA yang disusun	1 dok	1 dok	100
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1,301,485	1,278,000	98,20	Jumlah dokumen perubahan DPA yang disusun	1 dok	1 dok	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,814,162	4,871,000	71,48	Jumlah LPPD dan LKPj yang disusun	2 dok	2 dok	100
					Jumlah SAKIP yang disusun	1 dok	0	0
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,495,967,697	4,239,912,220	94,30	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	100	94	94
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,480,904,698	4,225,876,755	94,31	Penyediaan gaji,TPP,honor kontrak daerah, pembayaran honor PA/KPA/Bendahara/PPK/Pengurus barang/Pejabat PPHB	14 bln	14 bln	100
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10,405,039	10,237,465	98,39	Jumlah ATK yang disediakan	29 jenis	29 jenis	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,259,470	2,110,000	93,38	Laporan keuangan tahunan yang disusun	1 dok	1 dok	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2,398,490	1,688,000	70,38	Laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran/ prognosis	3 dok	3 dok	100
c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	329,783,304	204,005,000	61,86	Presentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100	62	62
	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	329,783,304	204,005,000	61,86	Jumlah Peserta Sosialisasi	700 orang	700 orang	100
					Jumlah Sosialisasi melalui media	2 jenis	2 jenis	100
					Jumlah Sosialisasi tatap muka	14 kali	14 kali	100
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	Pengiriman/penyelenggaraan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-	0	0	0

					undangan			
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	77,830,857	74,728,054	96,01	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	96	96
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,559,258	7,508,734	99,33	Komponen listrik dan tambah daya yang disediakan	1 kali	1 kali	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11,054,809	11,006,000	99,56	Jumlah barang pakai habis yang disediakan	29 jenis	29 jenis	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,737,990	7,736,600	99,98	Barang cetak yang disediakan	8 jenis	8 jenis	100
					Penggandaan yang disediakan	15000 lbr	775 lbr	5,17
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,760,000	2,600,000	94,20	Bahan bacaan, buku, koran yang disediakan	12 bln	12 bln	100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15,090,000	12,571,000	83,31	Makan minum tamu yang sediakan	12 kali	12 kali	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33,628,800	33,305,720	99,04	Rakor dalam dan luar daerah yang dilakukan	22 kali	12 kali	100
e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33,831,000	32,131,000	94,98	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	95	95
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27,000,000	25,300,000	93,70	Kendaraan dinas roda dua yang disediakan	1 unit	1 unit	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6,831,000	6,831,000	100	Pengadaan komputer, laptop, printer, AC dan lainnya	1 unit	1 unit	100
f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	177,440,296	155,480,192	87,62	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	88	88
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,961,010	1,934,000	98,62	Jumlah surat yang terkirim	1500 surat	1664 surat	110,93
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97,479,286	75,546,192	77,50	Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air dan komunikasi	12 bulan	12 bulan	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78,000,000	78,000,000	100	Honor penjaga malam, pengadministrasian dan cleaning servis	12 bulan	12 bulan	100
g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90,700,000	79,847,052	88,03	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam Kondisi baik	100	88	88
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72,500,000	61,683,052	85,08	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	6 unit	5 unit	83,33
					Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memperoleh jasa perizinan	22 unit	22 unit	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8,150,000	8,114,000	99,56	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	9 unit	8 unit	88,89

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10,050,000	10,050,000	100	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	1 unit	100
h	Penataan Organisasi	0	0	0	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	0	0
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	0	0	0	Jumlah dokumen SKM	0	0	0
					Jumlah Promosi pelayanan Publik Perangkat Daerah	0	0	0
B	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	452,396,568	399,438,000	88,37	Persentase fakir miskin yang mendapatkan pembinaan dalam penyelenggaraan pemberdayaan sosial	39.31		
a	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	223,533,271	188,488,000	84,32	Persentase fakir miskin yang mendapatkan pembinaan dalam penyelenggaraan pemberdayaan sosial	39.31		
	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	223,533,271	188,488,000	84,32	Jumlah Keluarga miskin yang dilatih keterampilan dan barang yang diserahkan /diberikan	30 orang	30 orang	100
b	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	228,863,297	210,950,000	92,32	Persentase fakir miskin yang mendapatkan pembinaan dalam penyelenggaraan pemberdayaan sosial	39.31		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	228,863,297	210,950,000	92,32	Jumlah Pilar-pilar Sosial yang berprestasi dan berhasil di Tingkat Kabupaten/Propinsi	12 lembaga	1 lembaga	8,33
C	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	5,080,253,503	4,159,854,409	81,88	Persentase PMKS yang menerima pelayanan dan rehabilitasi sosial	2.74		
a	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	862,989,920	388,978,153	45,07	Persentase PMKS yang menerima pelayanan dan rehabilitasi sosial	2.74		
	Penyediaan Permakanan	621,724,440	212,091,000	34,11	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia terlantar, Serta Gelandangan Pengemis diluar panti sosial yang mendapat pelayanan permakanan	80 org	79 org	98,75
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar,	241,265,480	176,887,153	73,32	Jumlah disabilitas yang mendapatkan bimbingan,	75 org	62 org	82,67

	Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat				keterampilan dan bantuan			
b	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	4,217,263,583	3,770,876,256	89,42	Persentase PMKS yang menerima pelayanan dan rehabilitasi sosial	2.74		
	Pemberian Layanan Kedaruratan	1,038,287,093	684,175,684	65,89	Jumlah PMKS yang Mendapat Layanan kedaruratan di RPS dan Rumah Singgah	1036 orang	541 orang	52,22
	Penyediaan Permakanan	2,918,227,638	2,848,102,572	97,60	Jumlah PMKS yang Mendapat Layanan kedaruratan	12210 orang	12210 orang	100
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	260,748,852	238,598,000	91,50	Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang diberi bimbingan	337 orang	75 orang	22,25
D	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	723,110,836	597,153,152	82,58	Persentase fakir miskin yang mendapatkan pembinaan dalam penyelenggaraan pemberdayaan sosial	39.31		
a	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	723,110,836	597,153,152	82,58	Persentase fakir miskin yang mendapatkan pembinaan dalam penyelenggaraan pemberdayaan sosial	39.31		
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	37,864,431	37,161,000	98,14	Data DTKS dan PBI JK	1 dok	1 dok	100
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	685,246,405	559,992,152	81,72	Jumlah PPKH dan BSP yang mampu menyelenggarakan sistem Administrasi PKH dan BSP	279 orang	279 orang	100
E	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	535,985,471	462,862,269	86,36	Persentase PMKS penerima program perlindungan dan jaminan sosial	4.52		
a	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota	158,106,334	146,426,960	92,61	Persentase PMKS penerima program perlindungan dan jaminan sosial	4.52		
	Penyediaan Makanan	158,106,334	146,426,960	92,61	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang dibantu	202 orang	116 orang	57,42
b	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	377,879,137	316,435,309	83,74	Persentase PMKS penerima program perlindungan dan jaminan sosial	4.52		

	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	102,292,054	89,521,500	87,52	Koordinasi dan Sosialisasi KSB	14 kec	9 kec	64,28
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	275,587,083	226,913,809	82,34	Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	14 kec	14 kec	100
F	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	59,866,282	52,549,000	87,78	Persentase fakir miskin yang mendapatkan pembinaan dalam penyelesaian permasalahan pemberdayaan sosial	39.31		
a	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	59,866,282	52,549,000	87,78	Persentase fakir miskin yang mendapatkan pembinaan dalam penyelesaian permasalahan pemberdayaan sosial	39.31		
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	59,866,282	52,549,000	87,78	Jumlah TMP yang dipelihara/direhabilitasi	0	0	0
					Peringatan hari besar nasional	4 keg	4 keg	100
2	Meningkatnya kesetaraan gender dan Perlindungan Anak				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86.04		
A	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	179,411,643	174,987,600	97,53	Persentase kelembagaan pengarusutamaan gender dan hak anak yang dibina	40		
a	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	49,115,527	45,937,600	93,53	Persentase kelembagaan pengarusutamaan gender dan hak anak yang dibina	40		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	49,115,527	45,937,600	93,53	Jumlah aparat desa/keluurahan yang mendapatkan sosialisasi PPRG	0	0	0
					Jumlah focal poin OPD yang mendapatkan pelatihan PPRG	50 orang	50 orang	100
					Jumlah lembaga masyarakat dan perguruan tinggi yang mendapatkan pelatihan	0	0	0
					Jumlah tim penggerak PUG yang mendapatkan pelatihan	0	0	0
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	130,296,116	129,050,000	99,04	Persentase kelembagaan pengarusutamaan gender dan hak anak yang dibina	40		
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan	130,296,116	129,050,000	99,04	Jumlah perempuan pelopor yang	0	50	0

	di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				mendapat pembinaan bidang politik, hukum, dan ekonomi			
					Jumlah perempuan yang mendapat bimbingan industri rumahan	30 orang	30 orang	100
					Jumlah perempuan yang mendapat KIE dan pembinaan di sekolah perempuan	0	0	0
B	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	233,105,965	226,827,840	97,31	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani	40		
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	233,105,965	226,827,840	97,31	Persentase kelembagaan pengarusutamaan gender dan hak anak yang dibina	40		
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	233,105,965	226,827,840	97,31	Honor tim pelaksana P2TP2A kabupaten Sampang	0	0	0
					Honor tim teknis konseling P2TP2A kabupaten Sampang	12 bulan	12 bulan	100
					Kunjungan/pendampingan/KIE	360 kali	305 kali	84,72
					Pendampingan sidang dan BAP	132 kali	108 kali	81,82
					Tim teknis konseling P2TP2A yang mendapat pelatihan manajemen kasus	0	0	0
					Tindakan visum	30 kali	22 kali	73,33
C	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1,120,000	1,120,000	90,32	Persentase kelembagaan pengarusutamaan gender dan hak anak yang dibina	40		
a	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,120,000	1,120,000	90,32	Persentase kelembagaan pengarusutamaan gender dan hak anak yang dibina	40		
	Penguatan Jejaring antar Lembaga	1,120,000	1,120,000	90,32	Jumlah organisasi	0	0	0

	Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				perempuan yang dibina pada forum PUSPA			
D	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	121,902,874	119,548,531	98,07	Persentase kelembagaan pengarusutamaan gender dan hak anak yang dibina	40		
a	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	121,902,874	119,548,531	98,07	Persentase kelembagaan pengarusutamaan gender dan hak anak yang dibina	40		
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	121,902,874	119,548,531	98,07	Tersedianya data kepala keluarga perempuan, data industri rumhan perempuan dan data perempuan migran	10000 data	7000 data	70
E	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	148,915,675	142,434,900	95,65	Persentase kelembagaan pengarusutamaan gender dan hak anak yang dibina	40		
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	148,915,675	142,434,900	95,65	Persentase kelembagaan pengarusutamaan gender dan hak anak yang dibina	40		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	148,915,675	142,434,900	95,65	Jambore pengurus forum anak	50 forum	50 forum	100
					Koordinasi gugus tugas kabupaten layak anak	6 kali	6 kali	100
					Lomba kreativitas poster anti kekerasan pada anak tingkat SD dan SMP	50 kali	50 kali	100
					Pembentukan forum anak desa	14 desa	14 desa	100
F	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	64,629,008	55,839,000	86,40	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani	100		
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	64,629,008	55,839,000	86,40	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani	100		
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	64,629,008	55,839,000	86,40	Jumlah perempuan yang diberi pelatihan PATBM	0	0	0

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang sampai dengan Tahun 2021 dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian sasaran RPJMD 2019-2024 yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terealisasi sampai dengan tahun anggaran berjalan. Adapun rekapitulasi pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d. Tahun 2021

Kode Rekening	Tujuan /Sasaran Renstra 2019-2024	Urusan /Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja Tahun 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2020	
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
	Menurunnya Jumlah PMKS		Persentase PMKS	%	8,27	9,07	8,87	8,71	98,20	8,67	115,94	14,02
	Sasaran:											
	Menurunnya Jumlah PMKS		Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	4,47	1,77	-	-	-	-	1,77	39,60
			Jumlah PMKS	orang	-	-	79.415	78.584	98,95	78.278	-	-
1.06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1.06.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi Dukungan pembaca layar diaktifkan.	%	-	-	100	92	92	100		
1.06.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	%	-	-	100	87	87	100		
1.06.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra/Renja yang disusun	dok	-	-	2 dok	2 dok	100	2 dok		
1.06.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	dok	-	-	1 dok	1 dok	100	1 dok		
1.06.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun	dok	-	-	1 dok	1 dok	100	1 dok		
1.06.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun	dok	-	-	1 dok	1 dok	100	1 dok		
1.06.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA yang disusun	dok	-	-	1 dok	1 dok	100	1 dok		
1.06.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah LPPD dan LKPj yang disusun	dok	-	-	2 dok	2 dok	100	5 dok		
			Jumlah SAKIP yang disusun	dok	-	-	1 dok	0	0	-		

Kode Rekening	Tujuan / Sasasaran Renstra 2019-2024	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja Tahun 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2020	
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
1.06.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	%	-	-	100	94	94	100		
1.06.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji, TPP, honor kontrak daerah, pembayaran honor PA/KPA/Bendahara/PPK/Pengurus barang/Pejabat PPHB	bln	-	-	14	14 bln	100	14 bln		
			Jumlah Pegawai ASN	orang	-	-	-	-	-	57 orang		
1.06.01.2.02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ATK yang disediakan	jenis	-	-	29 jenis	29 jenis	100			
1.06.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan tahunan yang disusun	dok	-	-	1 dok	1 dok	100	1 dok		
1.06.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran/ prognosis	dok	-	-	3 dok	3 dok	100	3 dok		
1.06.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	%	-	-	100	62	62	100		
1.06.01.2.05.01		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Mesin Fingerprint yang disediakan	unit	-	-	-	-	-	1 unit		
1.06.01.2.05.10		Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi	orang	-	-	700 orang	700 orang	100	-		
			Jumlah Sosialisasi melalui media	jenis	-	-	2 jenis	2 jenis	100	-	-	-
			Jumlah Sosialisasi tatap muka	kali	-	-	14 kali	14 kali	100	-	-	-
1.06.01.2.05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pengiriman/penyelenggaraan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	orang	-	-	0	0	0	-	-	-
1.06.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	-	-	100	96	96	100	-	-
1.06.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen listrik dan tambah daya yang disediakan	kali	-	-	1 kali	1 kali	100	10 jenis	-	-
1.06.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah barang pakai habis yang disediakan	jenis	-	-	29 jenis	29 jenis	100	27 Jenis	-	-

Kode Rekening	Tujuan / Sasasaran Renstra 2019-2024	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja Tahun 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2020	
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
1.06.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	jenis	-	-	-	-	-	36 Jenis		
1.06.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetak yang disediakan	jenis	-	-	8 jenis	8 jenis	100	8 jenis		
			Penggandaan yang disediakan	lbr	-	-	15000 lbr	775 lbr	5,17	15000 lbr		
1.06.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan, buku, koran yang disediakan	bln	-	-	12 bln	12 bln	100	12 bln		
1.06.01.2.06.08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan minum tamu yang sediakan	kali	-	-	12 kali	12 kali	100	12 kali		
1.06.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rakor dalam dan luar daerah yang dilakukan	kali	-	-	22 kali	12 kali	100	22 kali		
1.06.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	-	-	100	95	95	100	-	-
1.06.01.2.07.02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas roda dua yang disediakan	unit	-	-	1 unit	1 unit	100	-		
1.06.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan komputer, laptop, printer, AC dan lainnya	unit	-	-	1 unit	1 unit	100	3 unit		
1.06.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	-	-	100	88	88	100		
1.06.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	surat	-	-	1500 surat	1664 surat	110,93	1500 surat		
1.06.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air dan komunikasi	bulan	-	-	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan		
1.06.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor penjaga malam, pengadministrasian dan cleaning servis	bulan	-	-	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	-	-
1.06.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam Kondisi baik	%	-	-	100	88	88	100		
1.06.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	unit	-	-	6 unit	5 unit	83,33	6 unit		

Kode Rekening	Tujuan / Sasasaran Renstra 2019-2024	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja Tahun 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2020	
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memperoleh jasa perizinan	unit	-	-	22 unit	22 unit	100	23 unit		
1.06.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	unit	-	-	9 unit	8 unit	88,89	25 unit		
1.06.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit	-	-	1 unit	1 unit	100	5 unit		
1.06.01.2.013		Penataan Organisasi	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	-	-	100	0	0	100		
1.06.01.2.013.02		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen SKM	dok	-	-	0	0	0	1 dok		
			Jumlah Promosi pelayanan Pablik Perangkat Daerah	keg	-	-	0	0	0	-		
1.06.02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase fakir miskin yang mendapatkan pembinaan Dalam penyelenggaraan pemberdayaan sosial	%	-	-	39.31			0,75		
1.06.02.2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase fakir miskin yang mendapatkan pembinaan dalam penyelenggaraan pemberdayaan sosial	%	-	-	39.31			0,75		
1.06.02.2.01.01		Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga miskin yang dilatih keterampilan dan barang yang diserahkan/diberikan	orang	-	-	30 orang	30 orang	100	50 orang		
			Jumlah Anak Yatim yang diberi santunan				-	-	-	6,000 orang		
1.06.02.2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fakir miskin yang mendapatkan pembinaan dalam penyelenggaraan pemberdayaan sosial	%	-	-	39.31			0,75		
1.06.02.2.03.04		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pilar-pilar Sosial yang berprestasi dan berhasil di Tingkat Kabupaten/Propinsi	lembaga	-	-	12 lembaga	1 lembaga	8,33	6 Lembaga		
1.06.04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang menerima pelayanan dan	%	-	-	2.74			32,49		

Kode Rekening	Tujuan / Sasasaran Renstra 2019-2024	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja Tahun 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2020	
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
			rehabilitasi sosial									
1.06.04.2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang menerima pelayanan dan rehabilitasi sosial	%	-	-	2.74			32,49		
1.06.04.2.01.01		Penyediaan Permakanaan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia terlantar, Serta Gelandangan Pengemis diluar panti sosial yang mendapat pelayananpermakanaan	org	-	-	80 org	79 org	98,75	50 org		
1.06.04.2.01.06		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah disabilitas yang mendapatkan bimbingan, keterampilan dan bantuan	org	-	-	75 org	62 org	82,67	45 org		
1.06.04.2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang menerima pelayanan dan rehabilitasi sosial	%	-	-	2.74			32,49		
1.06.04.2.02.02		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah PMKS yang Mendapat Layanan kedaruratan di RPS dan Rumah Singgah	orang	-	-	1036 orang	541 orang	52,22	1036 orang		
1.06.04.2.02.03		Penyediaan Permakanaan	Jumlah PMKS yang Mendapat Layanan kedaruratan	orang	-	-	12210 orang	12210 orang	100	-		
1.06.04.2.02.08		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang diberi bimbingan	orang	-	-	337 orang	75 orang	22,25	140 orang		
1.06.05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase fakir miskin yang mendapatkan pembinaan dalam penyelenggaraan pemberdayaan sosial	%	-	-	39.31			49.56		

Kode Rekening	Tujuan / Sasaran Renstra 2019-2024	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja Tahun 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2020	
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
1.06.05.2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fakir miskin yang mendapatkan pembinaan dalam penyelenggaraan pemberdayaan sosial	%	-	-	39.31			49.56		
1.06.05.2.02.01		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Data DTKS dan PBI JK	dok	-	-	1 dok	1 dok	100	1 dok		
1.06.05.2.02.03		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PPKH dan BSP yang mampu menyelenggarakan sistem Administrasi PKH dan BSP	orang	-	-	279 orang	279 orang	100	279 orang		
1.06.06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase PMKS penerima program perlindungan dan jaminan sosial	%	-	-	4.52			44,00		
1.06.06.2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase PMKS penerima program perlindungan dan jaminan sosial	%	-	-	4.52			44,00		
1.06.06.2.01.01		Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang dibantu	orang	-	-	202 orang	116 orang	57,42	300 orang		
1.06.06.2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase PMKS penerima program perlindungan dan jaminan sosial	%	-	-	4.52			44,00		
1.06.06.2.02.01		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Koordinasi dan Sosialisasi KSB	kec	-	-	14 kec	9 kec	64,28	12 kec		
1.06.06.2.02.02		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	kec	-	-	14	14 kec	100	12 kec		
1.06.07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase fakir miskin yang mendapatkan pembinaan dalam penyelenggaraan pemberdayaan sosial	%	-	-	39.31	39.31	100	100		
1.06.07.2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase fakir miskin yang mendapatkan pembinaan dalam penyelenggaraan pemberdayaan sosial	%	-	-	39.31	39.31	100	100		

Kode Rekening	Tujuan / Sasasaran Renstra 2019-2024	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja Tahun 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2020	
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
1.06.07.2.01.02		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang dipelihara/direhabilitasi	unit	-	-	0	0	0	1 paket		
			Peringatan hari besar nasional	keg	-	-	4 keg	4 keg	100	4 keg		
2.08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			-	-						
	Meningkatnya kesetaraan gender dan Perlindungan Anak		Indeks Pembangunan Gender (IPG)		-	85,5	86,04	-	-	86,58		
	Sasaran:				-	-						
	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan		Persentase perempuan terlibat aktif dalam pembangunan		-	-	1,94	1,94	100	2,74		
2.08.02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase kelembagaan yang anggarustamaan gender dan hak anak yang dibina	%	-	-	40	40	100	45		
2.08.02,2,01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kelembagaan yang anggarustamaan gender dan hak anak yang dibina	%	-	-	40	40	100	45		
2.08.02,2,01.03		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah aparat desa/kelurahan yang mendapatkan sosialisasi PPRG	orang	-	-	0	0	0	50 orang		
			Jumlah focal poin OPD yang mendapatkan pelatihan PPRG	orang	-	-	50	50 orang	100	50 orang		
			Jumlah lembaga masyarakat dan perguruan tinggi yang mendapatkan pelatihan	orang	-	-	0	0	0	60 lembaga		
			Jumlah tim penggerak PUG yang	orang	-	-	0	0	0	25 orang		

Kode Rekening	Tujuan / Sasasaran Renstra 2019-2024	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja Tahun 2022	Prkiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2020	
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
			mendapatkan pelatihan									
2.08.02,2,02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kelembagaan pengarusutamaan gender dan hak anak yang dibina	%	-	-	40	40	100	45		
2.08.02,2,02.01		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah perempuan pelopor yang mendapat pembinaan bidang politik, hukum, dan ekonomi	orang	-	-	0	50 orang	0	-		
			Jumlah perempuan yang mendapat bimbingan industri rumahan	orang	-	-	30	30 orang	100	-		
			Jumlah perempuan yang mendapat KIE dan pembinaan di sekolah perempuan	orang	-	-	0	0	0	20 orang		
2.08.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani	%	-	-	40	40	100	45		
2.08.03.2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kelembagaan pengarusutamaan gender dan hak anak yang dibina	%	-	-	40	40	100	45		
2.08.04.2.02.01		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Honor tim pelaksana P2TP2A kabupaten Sampang	orang	-	-	0	0	0	-		
			Honor tim teknis konseling P2TP2A kabupaten Sampang	bulan	-	-	12	12 bulan	100	-		
			Kunjungan/pendampingan/KIE	kali	-	-	360	305 kali	84,72	-		
			Pendampingan sidang dan BAP	kali	-	-	132	108 kali	81,82	60 kali		
			Tim teknis konseling P2TP2A yang mendapat pelatihan manajemen kasus	orang	-	-	0	0	0			
			Tindakan visum	kali	-	-	30	22 kali	73,33	-		

Kode Rekening	Tujuan / Sasasaran Renstra 2019-2024	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja Tahun 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2020	
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
2.08.04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kelembagaan pengarusutamaan gender dan hak anak yang dibina	%	-	-	40	40	100	45		
2.08.04.2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelembagaan pengarusutamaan gender dan hak anak yang dibina	%	-	-	40	40	100	45		
2.08.04.2.02.02		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi perempuan yang dibina pada forum PUSPA	organisasi	-	-	0	0	0	80 orang		
2.08.05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase kelembagaan pengarusutamaan gender dan hak anak yang dibina	%	-	-	40	40	100	45		
2.08.05.2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelembagaan pengarusutamaan gender dan hak anak yang dibina	%	-	-	40	40	100	45		
2.08.05.2.01.01		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya data kepala keluarga perempuan, data industri rumahan perempuan dan data perempuan migran	data	-	-	10.000 data	7.000 data	70	5.000 orang		
2.08.05.2.01.02		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota										
2.08.06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase kelembagaan pengarusutamaan gender dan hak anak yang dibina	%	-	-	40	40	100	45		
2.08.06.2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan	Persentase kelembagaan pengarusutamaan gender dan hak anak yang dibina	%	-	-	40	40	100	45		

Kode Rekening	Tujuan / Sasasaran Renstra 2019-2024	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja Tahun 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2020	
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
		Kabupaten/Kota										
2.08.06.2.01.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jambore pengurus forum anak	forum	-	-	50 forum	50 forum	100			
			Koordinasi gugus tugas kabupaten layak anak	kali	-	-	6	6 kali	100			
			Lomba kreativitas poster anti kekerasan pada anak tingkat SD dan SMP	kali	-	-	50	50 kali	100			
			Pembentukan forum anak desa	desa	-	-	14	14 desa	100			
2.08.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani	%	-	-	100	100	100	100		
2.08.07.2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani	%	-	-	100	100	100	100		
2.08.07.2.02.01		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang diberi pelatihan PATBM	orang	-	-	0	0	0			

Evaluasi terhadap rekapitulasi pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang sampai dengan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Adanya Recofusing Anggaran dampak dari Pandemi Covid - 19 sehingga pelaksanaan kegiatan tidak terlaksana secara optimal;
2. Kurangnya Koordinasi dari Desa dan Kecamatan ke Dinas Sosial apabila terjadi Bencana Alam dan Bencana Sosial;
3. Lokasi tempat terjadinya Bencana sulit dijangkau untuk penyaluran bantuan.

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang

Analisis terhadap indikator kinerja pelayanan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan. Berdasarkan Renstra Perubahan 2019-2024 target dan realisasi indikator sasaran yang mencerminkan indikator kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang

NO.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target						Realisasi						Capaian					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																					
1	Persentase PMKS				8,77	9,07	8,87	8,67	8,47	8,27	8,77	9,07	8,71	-	-	-	107	98,09	98,20	-	-	-
2	Persentase fakir miskin yang mendapatkan pembinaan dalam penyelenggaraan pemberdayaan sosial	-	-	-	-	-	0,75	0,75	2,50	4,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Persentase PMKS yang menerima pelayanan dan rehabilitasi sosial	-	-	-	-	-	32,48	32,49	39,90	43,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	-	-	100	100	100	100	100	100	8,42	20,5	4,48	-	-	-	8,42	20,5	4,48	-	-	-
5	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100	0	93,66	-	-	-	100	0	93,66	-	-	-
6	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	-	-	100	100	100	100	100	100	2,88	0	6,05	-	-	-	2,88	0	6,05	-	-	-
7	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100	0	92,50	-	-	-	100	0	92,50	-	-	-
8	Persentase PMKS penerima program perlindungan dan jaminan sosial	-	-	-	-	-	97,39	87,51	76,76	72,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Persentase bantuan KSB korban bencana alam dan Korban Sosial	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	yg tertangani																						
10	Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial	100	-	-	100	100	100	100	100	100	6,77	100,53	126,67	-	-	-	6,77	100,53	126,67	-	-	-	
11	Persentase Taman Makam Pahlawan (TMP) yang dikelola	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	100	-	-	-	
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																						
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	-	-	84,79	85,50	86,04	86,58	87,12	87,66	-	84,79	82,52	-	-	-	100	98,94	-	-	-	-	
2	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang resposif gender (PPRG)	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	
3	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	
4	Persentase Organisasi Perempuan yang dibina				-	-	40	50	60	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Persentase OPD yang memanfaatkan Data Gender dan Anak				-	-	100	100	100	100	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	
6	Persentase Kelembagaan PUHA yang dibina				-	-	100	100	100	100	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	
7	Persentase Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang ditangani				-	-	100	100	100	100	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang merupakan salah satu institusi penyelenggara kesejahteraan sosial, Perempuan dan Anak yang telah diamanatkan oleh undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat (2) disebutkan, “ Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar dan keberfungsian sosial setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial “

Sebagaimana termuat dalam Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, isu – isu strategis yang dihadapi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penanganan dan pembinaan PMKS masih belum optimal
2. Penanganan dan pembinaan PMKS masih belum optimal
3. Masih Tingginya angka kekerasan pada perempuan dan anak
4. Masih Rendahnya Keadilan dan Kesetaraan gender

2.5 Faktor – faktor Kunci Keberhasilan

Faktor – faktor kunci pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang berhasil mencapai hasil-hasil yang direncanakan sebagai berikut :

1. Dukungan tokoh masyarakat dalam penanganan PMKS
2. Kesukarelawanan masyarakat dalam penanganan PMKS
3. Terbentuknya hubungan sinergis dengan satu instansi lain maupun instansi vertikal
4. Banyaknya partisipasi masyarakat dalam penanganan terhadap Anak

2.6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang tahun 2021 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 dengan kebutuhan riil Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang pada tahun tersebut.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang. Review tersebut di gambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Sampang

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021					HASIL ANALISA KEBUTUHAN DINAS SOSIAL TAHUN 2021				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
1.06.	URUSAN SOSIAL				6.154.465.803	URUSAN SOSIAL				6.154.465.803
1.06.1.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran		Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran	100%	480.129.500	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran		Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran		480.129.500
1.06.1.06.01.01.01	Pelayanan administrasi dan jasa perkantoran	Dinas Sosial	a. Jumlah Surat yang Dikirim	2000 surat	235.234.580	Pelayanan administrasi dan jasa perkantoran	Dinas Sosial	a. Jumlah Surat yang Dikirim	2000 surat	235.234.580
			b. Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Listrik ,Air,dan Komunikasi	12 bulan	-			b. Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Listrik ,Air,dan Komunikasi	12 bulan	-
			c. Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Memperoleh Jasa Perizinan	18 unit	-			c. Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Memperoleh Jasa Perizinan	18 unit	-
			d. Cakupan pemenuhan jasa kebersihan	1 paket	-			d. Cakupan pemenuhan jasa kebersihan	1 paket	-
			e. Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat	84 orang	-			e. Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat	84 orang	-
			f. Jumlah Pemenuhan Jasa Pendukung Administrasi /Teknis	14 bulan	-			f. Jumlah Pemenuhan Jasa Pendukung Administrasi /Teknis	14 bulan	-
			g. Cakupan pemenuhan bahan bacaan	866 ok	-			g. Cakupan pemenuhan bahan bacaan	866 ok	-
1.06.1.06.01.01.02.	Penyediaan sarana administrasi perkantoran	Dinas Sosial	a. Jumlah ATK	12 Paket	104.328.380	Penyediaan sarana administrasi perkantoran	Dinas Sosial	a. Jumlah ATK	12 Paket	104.328.380
			b. Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	1 Paket	-			b. Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	1 Paket	-
			c. Jumlah spanduk/umbul-umbul/bendera yang disediakan	2 bh	-			c. Jumlah spanduk/umbul-umbul/bendera yang disediakan	2 bh	-
			d. Jumlah barang cetakan	12 paket	-			d. Jumlah barang cetakan	12 paket	-
			e. Jumlah barang penggandaan	22.201 lbr	-			e. Jumlah barang penggandaan	22.201 lbr	-
			f. Jumlah komponen instalasi listrik	12 bulan				f. Jumlah komponen instalasi listrik	12 bulan	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021					HASIL ANALISA KEBUTUHAN DINAS SOSIAL TAHUN 2021				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
			g. Jumlah alat kebersihan yang disediakan	12 bulan				g. Jumlah alat kebersihan yang disediakan	12 bulan	
1.06.1.06.01.01.03.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Dinas Sosial	a. Jumlah koordinasi dalam daerah	22 kali	138.434.500	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Dinas Sosial	a. Jumlah koordinasi dalam daerah	22 kali	138.434.500
			b. Jumlah koordinasi luar daerah	39 kali	-			b. Jumlah koordinasi luar daerah	39 kali	-
1.06.1.06.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	359.750.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	382.595.095
1.06.1.06.01.02.01.	Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor	Dinas Sosial	a. Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 paket	104.999.875	Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor	Dinas Sosial	a. Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 paket	104.999.875
1.06.1.06.01.02.03.	Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Opearsional	Dinas Sosial	a. Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	6 unit	136.621.550	Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Opearsional	Dinas Sosial	a. Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	6 unit	136.621.550
1.06.1.06.01.02.04.	Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial	a. Jumlah pengadaan peralatan kantor	3 Unit	140.973.670	Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial	a. Jumlah pengadaan peralatan kantor	3 Unit	140.973.670
			b. Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	5 paket	-			b. Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	5 paket	-
			c. Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	3 unit	-			c. Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	3 unit	-
1.06.1.06.01.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100%	25.900.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100%	25.900.000
1.06.1.06.01.03.01.	Pelaksanaan bimtek/sosialisasi/seminar	Dinas Sosial	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/sosialisasi/seminar	4 Orang	25.900.000	Pelaksanaan bimtek/sosialisasi/seminar	Dinas Sosial	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/sosialisasi/seminar	4 Orang	25.900.000
1.06.1.06.01.04.	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu	100%	45.000.000	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu	100%	44.999.875

Kode	RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021					HASIL ANALISA KEBUTUHAN DINAS SOSIAL TAHUN 2021				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
1.06.1.06.01.04.01.	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKjIP	6 Dok	15.000.000	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKjIP	6 Dok	15.000.000
1.06.1.06.01.04.02.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Dinas Sosial	Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA	4 Dok	14.999.875	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Dinas Sosial	Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA	4 Dok	14.999.875
1.06.1.06.01.04.03.	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Dinas Sosial	a. Jumlah Dokumen SKM	1 Dok	15.000.000	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Dinas Sosial	a. Jumlah Dokumen SKM	1 Dok	15.000.000
			b. Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah	1 kali				b. Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah	1 kali	
1.06.1.06.01.15.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		Persentase PMKS penerima program perlindungan dan jaminan sosial	2,76	1.453.298.750	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		Persentase PMKS penerima program perlindungan dan jaminan sosial	2,76	1.150.374.105
1.06.1.06.01.15.01.	Pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia	Anak terlantar dan Lansia	Jumlah Anak dan Lanjut Usia yang mendapatkan bimbingan, keterampilan dan bantuan	30 orang	379.235.000	Pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia	Anak terlantar dan Lansia	Jumlah Anak dan Lanjut Usia yang mendapatkan bimbingan, keterampilan dan bantuan	30 orang	379.235.000
1.06.1.06.01.15.02.	Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial	Masyarakat Kab. Sampang	Jumlah Penyandang Tuna Sosial yang mendapatkan bimbingan, Keterampilan dan Bantuan	14 orang	150.350.000	Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial	Masyarakat Kab. Sampang	Jumlah Penyandang Tuna Sosial yang mendapatkan bimbingan, Keterampilan dan Bantuan	14 orang	150.350.000
1.06.1.06.01.15.03	Pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas	Penyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan bimbingan, Keterampilan dan Bantuan	27 orang	145.289.000	Pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas	Penyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan bimbingan, Keterampilan dan Bantuan	27 orang	145.289.000
1.06.1.06.01.15.04	Pelayanan psikososial bagi PMKS	PMKS Kab. Sampang	Jumlah Korban Psikososial yang tertangani	566 orang	447.820.105	Pelayanan psikososial bagi PMKS	PMKS Kab. Sampang	Jumlah Korban Psikososial yang tertangani	566 orang	447.820.105
1.06.1.06.01.15.05	Pendataan PMKS dan PSKS	Dinas Sosial	Data PMKS dan PSKS	1 dokumen	27.680.000	Pendataan PMKS dan PSKS	Dinas Sosial	Data PMKS dan PSKS	1 dokumen	27.680.000
1.06.1.06.01.16.	Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial		Persentase fakir miskin yang mendapatkan pembinaan dalam penyelenggaraan pemberdayaan sosial	39,31	1.525.588.750	Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial		Persentase fakir miskin yang mendapatkan pembinaan dalam penyelenggaraan pemberdayaan sosial	39,31	1.933.847.818

Kode	RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021					HASIL ANALISA KEBUTUHAN DINAS SOSIAL TAHUN 2021					
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	
1.06.1.06.01.16.01.	Penanganan dan Pelayanan Fakir Miskin	Masyarakat Kab. Sampang	Jumlah Fakir Miskin yang dibantu	60 orang	246.503.093	Penanganan dan Pelayanan Fakir Miskin	Masyarakat Kab. Sampang	Jumlah Fakir Miskin yang dibantu	60 orang	246.503.093	
1.06.1.06.01.16.02.	Fasilitasi kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial	Masyarakat Kab. Sampang	Jumlah peringatan hari besar nasional dan TMP	4 Keg dan 2 Paket	472.150.000	Fasilitasi kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial	Masyarakat Kab. Sampang	Jumlah peringatan hari besar nasional dan TMP	4 Keg dan 2 Paket	453.650.000	
1.06.1.06.01.16.03.	Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat dan pengelolaan sumber dana sosial	Masyarakat Kab. Sampang	Jumlah Lembaga yang dibina	8 Lembaga	255.811.725	Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat dan pengelolaan sumber dana sosial	Masyarakat Kab. Sampang	Jumlah Lembaga yang dibina	8 Lembaga	255.581.725	
1.06.1.06.01.16.04.	Fasilitasi Bantuan Sosial bagi keluarga miskin	Masyarakat Kab. Sampang	Jumlah RTSM penerima Raskin/Rastra	130.080 orang	763.809.000	Fasilitasi Bantuan Sosial bagi keluarga miskin	Masyarakat Kab. Sampang	Jumlah RTSM penerima Raskin/Rastra	130.080 orang	457.554.000	
1.06.1.06.01.16.05.	Verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT) dan PBI - JKN	Masyarakat Kab. Sampang	Data BDT dan PBI-JKN	1 Dokumen	520.559.000	Verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT) dan PBI - JKN	Masyarakat Kab. Sampang	Data BDT dan PBI-JKN	1 Dokumen	520.559.000	
1.06.1.06.01.17.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase PMKS penerima program perlindungan dan jaminan sosial	4,55	2.274.994.213	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase PMKS penerima program perlindungan dan jaminan sosial	4,55	2.042.751.450	
1.06.1.06.01.17.01.	Fasilitasi dan penanganan korban bencana alam	Masyarakat Kab. Sampang	Jumlah Korban Bencana Alam yang dibantu	6000 orang	550.150.000	Fasilitasi dan penanganan korban bencana alam	Masyarakat Kab. Sampang	Jumlah Korban Bencana Alam yang dibantu	6000 orang	550.150.000	
1.06.1.06.01.17.02.	Fasilitasi dan penanganan korban bencana sosial	Masyarakat Kab. Sampang	Jumlah Korban Bencana Sosial yang dibantu	72 orang	213.558.900	Fasilitasi dan penanganan korban bencana sosial	Masyarakat Kab. Sampang	Jumlah Korban Bencana Sosial yang dibantu	72 orang	213.558.900	
1.06.1.06.01.17.03	Penyelenggaraan sistem jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Jumlah PPKH kabupaten yang mampu menyelenggarakan sistem Administrasi PKH	234 orang	808.929.250	Penyelenggaraan sistem jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Jumlah PPKH kabupaten yang mampu menyelenggarakan sistem Administrasi PKH	234 orang	808.929.250	
1.06.1.06.01.17.04.	Pengelolaan rumah singgah bagi pendamping penderita rujukan keluarga miskin	Surabaya	Jumlah Hunian Penderita yang dapat ditampung	3.650 orang	470.113.300	Pengelolaan rumah singgah bagi pendamping penderita rujukan keluarga miskin	Surabaya	Jumlah Hunian Penderita yang dapat ditampung	3.650 orang	470.113.300	
TOTAL					6.154.465.803	TOTAL					6.154.465.803

Hasil analisa menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan yang dijabarkan di Rancangan Awal RKPD 2021 sudah sesuai kebutuhan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang Tahun 2021.

2.7 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yaitu dari kelompok masyarakat. Berdasarkan hasil telaahan data dan informasi dari penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten Sampang. Uraian dari kajian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Sampang Tahun 2020

Perangkat Daerah : Dinas Sosial Kabupaten Sampang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan Dinas Sosial pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada perencanaan pembangunan secara umum, sehingga pada bab ini usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Kabupaten Sampang adalah nihil.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, tentunya harus memperhatikan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini ditujukan demi tercapainya sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2022 tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (**RKP) Tahun 2022** dengan Tema **“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”**.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang sebagai unsur penunjang mempunyai tugas dan fungsi di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dituntut untuk dapat menterjemahkan dan mensinergikan prioritas pembangunan antara provinsi dan daerah. Adapun sinkronisasi prioritas pembangunan daerah, provinsi dan pusat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan
Kabupaten Sampang Tahun 2022

NO.	NASIONAL	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG
1	Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan	Pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta pengentasan kemiskinan	Prioritas 1 : Peningkatan kualitas pembangunan pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana dasar masyarakat dan pengentasan kemiskinan Prioritas 4: Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional
2	Infrastruktur dan pemerataan wilayah	Pemerataan pembangunan dan penguatan konektivitas serta manajemen kebencanaan	Prioritas 3: Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup dan penanganan bencana
3	Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup	Peningkatan ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, energi dan pelestarian lingkungan hidup	
4	Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja	Peningkatan ekonomi kerakyatan melalui nilai tambah ekonomi dan pariwisata, kualitas ketenaga kerjaan serta perluasan kesempatan kerja	Prioritas 2: Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor pariwisata, agribisnis serta ekonomi kreatif didukung oleh iklim investasi yang sehat
5	Stabilitas pertahanan dan keamanan	Peningkatan ketentraman dan ketertiban	Prioritas 5: Peningkatan harmonisasi kehidupan masyarakat

Sumber : RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang Tahun 2022 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2024. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2022 sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Sampang Tahun 2022

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUN 2022
	Tujuan:			
1	Menurunnya Jumlah PMKS	1	Persentase PMKS	8,47
2	Meningkatnya kesetaraan gender dan Perlindungan Anak	2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,10
	Sasaran:			
1	Menurunnya Jumlah PMKS	1	Jumlah PMKS	77.141
2	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	2	persentase perempuan terlibat aktif dalam pembangunan	2,74

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sampang Tahun 2022

Dalam merumuskan program kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempertimbangkan beberapa faktor penting. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan salah satunya yaitu pencapaian visi dan misi kepala daerah. Merujuk pada RPJMD Kabupaten Sampang, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung pada pencapaian **misi 1** yaitu **“Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing”**. Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

bidang Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Sebagaimana telah tertuang dalam Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2024, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang mendukung pada pencapaian misi 1 RPJMD Kabupaten Sampang serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing”**.

Adapun program-program yang mendukung pada sasaran tersebut, yaitu:

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota;
- Program Pemberdayaan Sosial;
- Program Rehabilitasi Sosial;
- Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial;
- Program Penanganan Bencana;
- Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
- Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;
- Program Perlindungan Perempuan;
- Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
- Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak;
- Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
- Program Perlindungan Khusus Anak;

Program-program diatas kemudian dikompilasikan dengan hasil analisa kebutuhan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya sehingga perumusan rencana program dan kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022 sebagaimana terlampir sesuai dengan hasil entry rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 pada sistem aplikasi : <https://e-planning.sampangkab.go.id/>.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengampu urusan Unsur Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Program-program Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2022 mendukung prioritas pembangunan **“Prioritas 1. “Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing”** sebagaimana tertuang pada RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial Tahun 2022**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1.06.	URUSAN SOSIAL			
01.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	8,389,704,808
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	100	43,500,000
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra/Renja yang disusun	2 dok	5,500,000
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	1 dok	3,500,000
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun	1 dok	2,000,000
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun	1 dok	4,000,000
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA yang disusun	1 dok	2,000,000
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah LPPD dan LKPj yang disusun	2 dok	9,500,000
		Jumlah SAKIP yang disusun	1 dok	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	100	6,407,633,316
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji,TPP,honor kontrak daerah, pembayaran honor PA/KPA/Bendahara/PPK/Pengurus barang/Pejabat PPHB	57 orang	6,372,032,856
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ATK yang disediakan	46 jenis	30,000,000
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan tahunan yang disusun	1 dok	2,779,470
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan keuangan bulanan,triwulanan, semesteran/prognosis	3 dok	2,820,990
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100	32,308,000
1.06.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pengiriman/penyelenggaraan bimbingan teknis implentasi peraturan perundang-undangan	3 orang	32,308,000
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	246,142,800

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen listrik dan tambah daya yang disediakan	10 jenis	20,000,000
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah barang pakai habis yang disediakan	27 jenis	35,000,000
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetak yang disediakan	8 jenis	13,000,000
		Penggandaan yang disediakan	15000 lbr	
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan, buku, koran yang disediakan	12 bulan	2,760,000
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan minum tamu yang sediakan	12 bulan	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rakor dalam dan luar daerah yang dilakukan	22 kali	144,882,800
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	210,000,000
1.06.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas roda dua yang disediakan	3 unit	60,000,000
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan komputer, laptop, printer, AC dan lainnya	5 unit	150,000,000
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	182,000,000
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	1,500 surat	4,000,000
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik,air dan komunikasi	12 bulan	100,000,000
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor penjaga malam, pengadministrasian dan cleaning servis	12 bulan	78,000,000
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam Kondisi baik	100	285,000,000
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	6 unit	170,000,000
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memperoleh jasa perizinan	23 unit	
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	9 unit	15,000,000
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3 unit	100,000,000
1.06.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	15,000,000
1.06.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen SKM	1 dok	15,000,000
		Jumlah Promosi pelayanan Pablik Perangkat Daerah	2 kali	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase fakir miskin yang mendapatkan pembinaan dalam Penyelenggaraan pemberdayaan sosial	3.75	689,255,689
1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah komunitas Adat Terpencil yang memerlukan pembinaan dan pelatihan	50 orang	234,709,934
1.06.02.2.01.01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga miskin yang dilatih keterampilan dan barang yang diserahkan/diberikan	50 orang	234,709,934
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga PSKS yang memerlukan Pengembangan.	6 lembaga	454,545,755

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pilar-pilar Sosial yang berprestasi dan berhasil di Tingkat Kabupaten/ Propinsi	6 lembaga	454,545,755
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang menerima pelayanan dan rehabilitasi sosial	32,49	2,005,734,464
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti*	100	
		Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti*	100	
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti*	100	
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti*	100	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	cakupan Rehabilitasi Sosial Dasar yang di fasilitasi	32.48	785,864,920
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia terlantar, Serta Gelandangan Pengemis diluar panti sosial yang mendapat pelayanan permakanan	50 orang	621,724,440
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang mendapatkan keterampilan dan bantuan	45 orang	164,140,480
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Rehabilitasi Sosial PMKS selain HIV, NAPZA yang tertangani	2212 orang	1,219,869,544
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah PMKS yang Mendapat Layanan kedaruratan di RPS dan Rumah Singgah	1,036 orang	983,120,692
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah PMKS yang Mendapat Layanan kedaruratan	0	0
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang diberi bimbingan	140 orang	236,748,852
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS penerima program perlindungan dan jaminan sosial	49.56	1,950,000,000
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen DTKS dan PBI JK yang di publikasi	1 dok	1,950,000,000
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Data DTKS dan PBI-JKN	1 dok	750,000,000
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PPKH dan BSP yang mampu menyelenggarakan sistem Administrasi PKH dan BSP	279 orang	1,200,000,000
01.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase bantuan KSB korban bencana alam dan Korban Sosial yg tertangani	44,00	765,000,000
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Bencana Alam dan Sosial yang dibantu	300 kali	250,000,000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Bencana Alam dan Sosial yang mendapat makanan	300 kali	250,000,000
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan KSB dan Taruna Siaga Bencana	44,00	515,000,000
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	jumlah Pelaksanaan fasilitasi Kampung Siaga Bencana	12 kali	125,000,000
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	jumlah Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	12 kali	390,000,000
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan (TMP) yang dikelola	100	500,000,000
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	500,000,000
2.08.	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang resposif gender (PPRG)	45	136,281,400
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PD yang melaksanakan PPRG	70 orang	136,281,400
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah aparat desa/keluurahan yang mendapatkan sosialisasi PPRG	70 orang	136,281,400
		Jumlah focal poin OPD yang mendapatkan pelatihan PPRG	50 orang	
		Jumlah lembaga masyarakat dan perguruan tinggi yang mendapatkan pelatihan	75 orang	
		Jumlah tim penggerak PUG yang mendapatkan pelatihan	20 orang	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang mendapatkan pembinaan bidang politik hukum sosial ekonomi, industri rumahan, dan KIE pada sekolah perempuan	230 orang	196,500,000
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah perempuan pelopor yang mendapat pembinaan bidang politik, hukum, dan ekonomi	200 orang	196,500,000
		Jumlah perempuan yang mendapat bimbingan industri rumahan	30 orang	
		Jumlah perempuan yang mendapat KIE dan pembinaan di sekolah perempuan	0	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	100	290,975,470
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan	50 orang	290,975,470
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Honor tim pelaksana P2TP2A kabupaten Sampang	10 orang	290,975,470
		Honor tim teknis konseling P2TP2A kabupaten Sampang	22 orang	
		Kunjungan/pendampingan/KIE	360 kali	
		Pendampingan sidang dan BAP	132 kali	
		Tim teknis konseling P2TP2A yang mendapat pelatihan manajemen kasus	22 orang	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		Tindakan visum	30 kali	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Organisasi Perempuan yang dibina	100	63,000,000
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah organisasi perempuan yang dibina dalam forum PUSPAGA	50	63,000,000
2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi perempuan yang dibina pada forum PUSPA	50 orang	63,000,000
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang memanfaatkan Data Gender dan Anak	100	150,000,000
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen profil Gender dan anak yang disusun	1 dok	150,000,000
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya data kepala keluarga perempuan, data industri rumahan perempuan dan data perempuan migran	1 dok	150,000,000
02.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kelembagaan PUHA yang dibina	100	199,079,980
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PHA yang dibentuk dan dibina	80 orang	199,079,980
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jambore pengurus forum anak	80 orang	199,079,980
		Koordinasi gugus tugas kabupaten layak anak	10 kali	
		Lomba kreativitas poster anti kekerasan pada anak tingkat SD dan SMP	50 kali	
		Pembentukan forum anak desa	28 forum	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang ditangani	100	108,779,943
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang memerlukan perlindungan Khusus yang ditangani	98 orang	108,779,943
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang diberi pelatihan PATBM	98 orang	108,779,943
TOTAL				15.247.861.754

Pada Tahun 2022 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan melaksanakan Urusan Sosial dengan anggaran Rp. **14,299,694,961.00** sedangkan untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Anggaran Rp. **948,116,793.00** Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **2 urusan, 12 program dan 22 kegiatan 45 Sub Kegiatan**. Sifat penyebaran lokasi

program dan kegiatan yaitu di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang.

BAB V PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang disusun sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022 yaitu **“Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dalam mendukung Pemantapan Pemulihan Ekonomi Menuju Sampang Hebat Bermartabat”**, dan penjabaran dari tujuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu **“Terbangunnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”**

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2024. Adapun tujuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah **“Menurunnya Jumlah PMKS dan Meningkatnya kesetaraan gender dan Perlindungan Anak”** yang didukung oleh sasaran yaitu: **Menurunnya Jumlah PMKS dan Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan.**

Pada Tahun 2022 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan melaksanakan Urusan Sosial dengan total anggaran Rp. 15.247.861.754,00 yang Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **2 urusan, 12 program dan 22 kegiatan 45 Sub Kegiatan**. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka pelaksanaan renja tahun 2022, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut supaya program dan kegiatan yang telah di rencanakan sesuai dengan harapan pembangunan. Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang haruslah berpedoman kepada RKPD dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan propinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi;

2. Dokumen Renja ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022;
3. Dokumen Renja ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat tahunan.

BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAIDI